

MANFAAT CSR DAN PERAN CSO

Oleh : Matdio Slaahsan, SE, MM, CP, NNL, CLMA Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Bhangrakara Jakarta Raya, Sekolah Mahasiswa S-3 Konsentrasi Manajemen Keuangan - UNPAK Bogor, Jawa Barat

DALAM program pembangunan berkelanjutan setiap bisnis memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan tempatnya berdiri. Sifat tanggung jawab sosial ini wajib, dan apabila tidak dilakukan, bisnis terancam terkena sanksi. CSR adalah salah satu program guna memenuhi kewajiban tersebut.

Apa itu CSR ?

Kepanjangan CSR adalah Corporate Social Responsibility. Kata "Corporate" artinya perusahaan, "Social" berarti sosial, dan "Responsibility" yaitu tanggung jawab. Jadi, corporate social responsibility adalah aktivitas bisnis dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan besar akan menimbulkan berbagai potensi risiko merusak lingkungan. Keberadaan CSR perusahaan diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan membuat risiko tersebut menjadi nol.

Peran masyarakat sipil / Civil Society Organisasi (CSO)

Dalam pembangunan lebih banyak didomir oleh organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO). Ketika kesadaran atas peran masyarakat sipil menjadi sebuah kebutuhan penting, ternyata keberadaan CSO masih mengandung berbagai persoalan mendasar, di antaranya kesenjangan pendanaan kerja jangka panjang, masih lemahnya kapasitas dan struktur kelembagaan, serta eksklusivitas kerja CSO yang minim inisiatif untuk bersinergi dengan pelaku pembangunan lain.

Hal yang paling menonjol adalah ketergantungan CSO yang masih sangat bersandar pada lembaga donor (terutama dari lembaga donor asing). Hal ini jelas menyebabkan CSO memiliki keterbatasan dalam mengembangkan program yang berbasis konteks kebutuhan lokal dan berdimensi jangka panjang. Kini, CSO dihadapkan pada penurunan ketersediaan dukungan pendanaan dari lembaga donor asing. Berbagai inisiatif kreatif dan inovatif dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan terancam tidak mendapatkan dukungan yang berkelanjutan, terganggunya sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha dengan CSO, Sinergi CSO dan dunia usaha, khususnya melalui pengelolaan CSR, merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kerangka kemitraan masa depan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi peran sangat penting agar program dan dana CSR tersebut tepat sasaran.

Besar Anggaran Dana CSR Setelah mengetahui apa itu CSR, kita akan membahas terkait pendanaan CSR. Dana CSR adalah sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan Peraturan UU PT dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai kebijakan perusahaan. Meski demikian, biaya CSR wajib setiap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat 1-4 Bab V Tentang Jawab Sosial Dan Lingkungan

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Namun tidak dipungkiri, kebijakan ini juga bergantung pada peraturan daerah setempat. Misalnya daerah Kalimantan Timur mengutar besaran dana CSR adalah minimal 3% dari laba bersih perusahaan tiap tahunnya.

Manfaat CSR

Selain mengurangi risiko kerusakan, CSR adalah kegiatan yang punya banyak keuntungan lain. Adapun manfaat dari Corporate Social Responsibility adalah sebagai berikut. 1) Bagi Lingkungan Hidup

Pertama, manfaat CSR adalah membantu menjaga lingkungan hidup. Suatu perusahaan diminta tak hanya mengejar keuntungan dalam jangka waktu tertentu, namun harus aktif berkontribusi terhadap kualitas lingkungan melalui dana CSR perusahaan.

2) Bagi Masyarakat Selanjutnya, manfaat corporate social responsibility adalah untuk berkontribusi dalam masyarakat. Contoh nyata corporate social responsibility adalah pendirian pabrik di tengah-tengah masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga sekitar. Selain itu, CSR perusahaan juga dapat diwujudkan dengan menyerap tenaga kerja dari warga di lingkungan perusahaan.

3) Bagi Perusahaan. Berikutnya, manfaat CSR adalah membantu perusahaan dalam meningkatkan citra di mata masyarakat. Ketika nama perusahaan terbentuk baik di mata masyarakat, maka proses branding juga akan lebih mudah, terutama jika target masyarakat yang merasakan CSR berskala nasional, seperti baseball sepa bola, pendirian sumur di daerah kering, dan sebagainya.

4) Bagi Pemerintah. Terakhir, manfaat corporate social responsibility adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, pengangguran, kemiskinan, minimnya fasilitas

>>>BERSAMBUNG KE HALAMAN II

Kecelakaan Maut Odong-odong Harus Jadi Bahan Evaluasi

JAKARTA, Pelita RAKYAT

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus berduka atas meninggalnya sembilan orang warga akibat kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta saat menyeberang di Serang, Banten, la mendorong agar peristiwa tersebut dapat menjadi bahan evaluasi.

"Atas nama Komisi V DPR RI, saya menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan yang terjadi dan tentunya duka cita mendalam

terhadap seluruh korban yang berpulang akibat peristiwa tersebut," ungkap Lasarus, dalam rilis yang diterima Kamis (26/7/2022). Atas kecelakaan tersebut, Komisi V DPR yang membina urusan infrastruktur dan transportasi mengingatkan Kementerian untuk menjadikan kecelakaan maut odong-odong di Serang itu sebagai bahan evaluasi. Menurut Lasarus, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib menggalakkan sosialisasi serta

dukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. "Ini masalah klasik di perlintasan sebidang terus berulang, mana kala kesadaran pengguna jalan yang kurang terhadap bahaya yang mengintai di perlintasan sebidang atau pengaman pintu perlintasan sebidang yang lemah," tuturnya.

Kecelakaan maut odong-odong versus kereta api terjadi di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan,

Kabupaten Serang, Banten, pada Selasa kemarin (26/7). Selain korban meninggal, terdapat pula 24 penumpang odong-odong yang mengalami luka berat dan ringan.

Lasarus pun meminta Pemerintah melalui instansi-instansi terkait untuk menutup seluruh perlintasan sebidang, khususnya perlintasan ilegal maupun yang tidak memiliki palang pintu. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya lagi kecelakaan lalu lintas. "Yang paling aman memang



tidak ada lagi perlintasan sebidang. Semestinya kecelakaan bisa dicegah jika perlintasan sebidang illegal tegas ditutup, dan atau semua dalam penjagaan petugas perkeretaapian," ujar Lasarus (eko/aha/parle/bs*)

Legislator Ingatkan Pemerintah Berhati-Hati Cabut Kebijakan DMO

JAKARTA, Pelita RAKYAT

Anggota Komisi VII Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengimbau pengusaha untuk menyetor produksi CPO, karena hal tersebut dinilai berisiko tidak efektif dan malah membuat harga minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hal tersebut dikatakannya saat menanggapi pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut rencana penghapusan kewajiban DMO-DPO (Domestic Price Obligation) CPO untuk bahan baku minyak goreng domestik. "Pendekatan negara tidak cukup sekadar berupa imbauan moral, meminta komitmen pengusaha atau semacam gentlemen agree-

ment terkait dengan penyediaan CPO sebagai bahan baku minyak goreng dalam negeri," kata Mulyanto kepada media, Rabu (27/7/2022).

Mulyanto menilai, imbauan kepada pengusaha selama ini adalah pendekatan kultural dalam masyarakat. Namun, pendekatan pemerintah semestinya lebih bersifat struktural berbasis regulasi. "Negara memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, karenanya pendekatan negara terutama bersifat binding (mengikat) dan compulsory (memaksa) bukan sekedar voluntary (sukarela)," ujarnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Banten III mengingatkan, sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga pernah mendesak partisipasi produsen sawit untuk ikut dalam program subsidi minyak goreng curah berbasis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPPDKS), namun, imbauan tersebut tidak efektif.

Untuk itu, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dengan rencana penghapusan kebijakan DMO-DPO minyak sawit saat dan menyerahkan ketersediaan pada kesukarelaan komitmen produsen. Ia pun mewanti-wanti jangan sampai kebijakan tersebut justru



menyebabkan lonjakan harga minyak goreng dan memicu inflasi sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan secara hati-hati, jangan gegabah apalagi condong pada pengusaha minyak goreng ketimbang masyarakat umum. "Pemerintah tidak cukup bekerja berbasis 'imbau' tetapi harus 'hadiri' mengedalikan aspek ketersediaan dan harganya. Jangan s modais ini langka at tidak terjangkau n seperti sebelum-se tetapi harus 'hadiri' mengedalikan aspek ketersediaan dan psrle/bs)

Mendagri : Mesti Tidak Mudah APiP Harus Tingkatkan Integritas

JATINANGOR, Pelita RAKYAT

Dalam konteks pengawasan, mekanisme kerja APiP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dapat dilaksanakan secara top-down maupun bottom-up. Pemeriksaan ataupun pengawasan bottom-up dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, dan hasil pemeriksaan disampaikan tidak hanya kepada Kepala Daerah Tingkat II, juga harus disampaikan kepada Inspektur Daerah tingkat provinsi. Demikian juga pada pemeriksaan Daerah Tingkat I, hasil pemeriksaan dan temuan tidak hanya disampaikan kepada Gubernur selaku atasan, namun hasil temuan pemeriksaan disampaikan juga kepada Inspektur Jenderal Kemendagri.

"Kemudian pada mekanisme top-down, instansi atau elemen pemerintahan tingkat atas dapat langsung melakukan pemeriksaan ke bawah ketika ada informasi dari berbagai pihak untuk dilakukan klarifikasi" jelas Menteri Tito melalui pertemuan virtual pada acara Rapat Koordinasi Inspektur Daerah dari ruang kerjanya di IPDN Jatinangor Jawa Barat, Selasa (26/07/2022).

Pada Acara yang bertema "APiP Kawal Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah" yang diikuti para APiP seluruh daerah tingkat I dan II di Indonesia ini, Mendagri mengingatkan kembali empat inti utama peran APiP "Peran APiP yang pertama, Melakukan Pencegahan Pelanggaran (baik pidana maupun administrasi serta



perilaku anggota); dan mengevaluasi kinerja pegawai; Kedua, Melakukan pemeriksaan baik reguler maupun khusus secara berjenjang, ketiga, Memberikan pendampingan saat pemeriksaan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan; BPK) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aparat Penegak Hukum (APH), ataupun pengawas lainnya (Ombudsman, Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKN), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan lain-lain; dan keempat, Memberikan saran kepada pimpinan untuk tindakan hukum pada pegawai "papar Mendagri.

Mendagri paham dan menyadari, untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan diatas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APiP) harus mampu meningkatkan integritas. APiP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas pengendalian internal guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Ke empat peran utama APiP diatas harus dilakukan dengan integritas tinggi. Menurut Mendagri, peningkatan integritas pegawai inspektur ini tidak gampang, karena APiP inspektur itu adalah "sapu". Sapu yang berusaha selain mencegah, (juga) membersihkan sampah atau kotoran yang bisa menodai jalannya pemerintahan yang bersih, clear government dan clean government.

"Kendati merupakan suatu hal yang sulit dilakukan, 'integritas' dalam jiwa setiap aparat bukanlah sesuatu yang tak dapat diwujudkan. Upaya peningkatan integritas dapat ditempuh melalui berbagai cara, salah satunya lewat jalur formal seperti pemberian motivasi melalui giat BerAKHLAK, atau kegiatan keagamaan BerAKHLAK menjadi core values Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif " tutur Mendagri/(red-ton)

Plt. Sekda Ikuti Monitoring dan Evaluasi Pe Jamsostek Bagi Guru dan Tenaga Kepe



PALU, Pelita RAKYAT

Sulawesi Tengah. Plt. Sekda Dr. Rudi mengikuti Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Oleh Peme tan dilaksanakan secara daring maupun luring Meeting Bertempat, diruang kerja Asisten Rabu, (27/7/2022)

Turut mendampingi mendampingi Plt. S SE, MM, yakni, Sekretaris BPPAD Donyu Bidang Pendidik dan Kependidikan Disdikbid Hafsa Radjamura, M.Si, Kepala Kantor Cal jana Sulawesi Tengah Raudan Haroy Agung C Keespartaan BPIS Ketenagakerjaan Amruil

Pada kesempatan itu, Sekjen Kem budayaan Riset dan Teknologi diwakili Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani m meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkatkan pertumbuhan ekonomi y oleh sumber daya manusianya. Sehingga dapat memaksimalkan nilai dari diri masing dengan maksimal dengan membantu tunjangan yang di harapkan. Selanjutnya, unt an sosial secara menyeluruh negara mel Tahun 2004 tentang sistem jaminan sos memberikan kesempatan perlindungan d seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya jaminan sosial g berupaya meningkatkan kemampuan jnya agar bisa memproduksi dan men serta memiliki peran yang sangat pent pelopor teransisi kearah positif pada

Adapun data perlindungan Gur (GTK) Provinsi Sulawesi Tengah ya sudah didaftarkan dengan jumlah (Kabupaten Morowali Utara sudah di 667 orang melalui GTK 967 orang mel sudah didaftarkan dengan jumlah (

Selanjutnya, Kabupaten Tojo Un akan APBD dengan jumlah GTK 7; akan didaftarkan, Kabupaten Si

Dukung Program MBKM dan Riset Kehumasan

Kemensekneg Kolaborasi Dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

YOGYAKARTA, Pelita RAKYAT

Pendidikan menjadi salah satu pilar kemajuan suatu bangsa dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan menjadi strategis guna mensukseskan implemmentasi Gerakan Merdeka



atiftas yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu fak tor pendorong Kemensekneg un tuk menyediakan fasilitas belajar yang dapat mendorong pengem

dengan adanya rencana untuk menjalin kerja sama ini dapat menjadi fasilitas bagi para mahasiswa untuk merdeka belajar sesuai dengan peminatan kebutuhan dan karakteristik dari pe serta didik agar adaptif terhadap